

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH

**(Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2017)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

DANNY TRI RINANTO

NIM. 12020112140096

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Danny Tri Rinanto
Nomor Induk Mahasiswa : 12020112140096
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan
Judul Usulan : **ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Kasus
Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2017)**
Dosen Pembimbing : Nenek Woyanti, S.E., M.Si.

Semarang, 30 Oktober 2018

Dosen Pembimbing,

(Nenek Woyanti, S.E., M.Si)

NIP. 196905121994032003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Danny Tri Rinanto
Nomor Induk Mahasiswa : 12020112140096
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN
ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH
(Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013-2017)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 27 November 2018

Tim Penguji

1. Nenek Woyanti, S.E., M.Si (.....)

2. Dra. Herniwati Retno Handayani, MS (.....)

3. Achma Hendra Setiawan, S.E., M.Si (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Danny Tri Rinanto, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 30 Oktober 2018
Yang membuat pernyataan

(Danny Tri Rinanto)
NIM: 12020112140096

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Bukanlah bintang-bintang yang menentukan takdir kita, melainkan kita sendiri.”

(William Shakespeare)

“Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat.”

(HR. Muslim)

“What doesn't kill me makes me stronger”

(Friedrich Nietzsche)

Skripsi ini saya persembahkan untuk almarhum bapak, ibu, kakak, saudara, dan orang-orang yang terkasih dalam hidupku.

ABSTRACT

Regional autonomy in Indonesia, every region must have ability to manage the regional finances. The differences in potential between regions generate inequality of regional income sources. General allocation funds from central government which the function is eliminate fiscal gaps are more bigger than regional original income of districts and cities in Central Java. Therefore this study aims to analyze the effect of Regional Original Income (PAD) and General Allocation Funds (DAU) on local government expenditure.

This research uses multiple linear regression with a fixed effect model approach. The data that used are quantitative data with panel data types consisting of 35 district / cities in Central Java Province from 2013 to 2017.

The result of this research indicated that PAD and DAU have a significant impact on local government expenditure. The different role of PAD and DAU on regional expenditure between districts and cities. DAU has a big role in district's expenditure, meanwhile cities expenditure in Central Java be affected by PAD.

Keywords: Regional autonomy, regional original income, general allocation fund, local government expenditure

ABSTRAK

Adanya otonomi di Indonesia, setiap daerah dituntut memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan daerahnya. Perbedaan potensi antar daerah menghasilkan ketimpangan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berbeda-beda. Dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum yang berfungsi membantu memenuhi kebutuhan fiskal yang tidak sebanding dengan potensi fiskal, ternyata lebih besar dari pada pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan pendekatan model efek tetap. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dengan jenis data panel yang terdiri dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2013 hingga 2017.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan PAD dan DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Terdapat perbedaan peran PAD dan DAU terhadap belanja daerah antara kabupaten dan kota. DAU memiliki peran dan pengaruh lebih besar terhadap belanja daerah kabupaten-kabupaten, sedangkan belanja daerah kota-kota di Provinsi Jawa Tengah lebih besar dipengaruhi oleh peran PAD.

Kata Kunci : otonomi daerah, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja daerah.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017)*” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang. Selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari mendapatkan banyak bimbingan, bantuan secara langsung maupun tidak langsung, doa dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Ibu Nenek Woyanti S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing skripsi atas ilmu, waktu dan arahan dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Darwanto S.E., M.Si selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi selama masa perkuliahan.

5. Seluruh dosen, staff, dan petugas FEB UNDIP yang telah memberikan ilmu dan fasilitas selama penulis menjalani masa perkuliahan.
6. Kepada kedua orang tua tercinta Alm. Bapak Basuki dan Ibu Sri Rahayu, serta kakakku tersayang Elly Dianita Sari yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, doa, dan dorongan baik secara moril maupun materiil kepada penulis selama ini.
7. Kepada seluruh keluarga besar Bapak Soepardan yang telah memberikan doa, perhatian, dan bantuan selama penulis menjalani perkuliahan.
8. Sahabat-sahabatku Bintang, Rama, Alif, Sindhu, Wisnu, Shihab, Anggoro, Fauzan, Abdillah, Alfian, Kaka, Fitri, dan Reza yang telah memberikan kenangan, bantuan, dan menjadi teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Terimakasih Attika Purbosari yang selalu menemani dan memberi semangat, sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar IESP 2012, terimakasih atas semangat, motivasi, persaudaraan, kenangan, dan kerjasama selama perkuliahan di FEB UNDIP.

Semarang, 30 Oktober 2018

Penulis

Danny Tri Rinanto

NIM 12020112140096

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Kegunaan Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TELAAH PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah	15
2.1.2 Otonomi Daerah	16
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	20
2.1.4 Sumber-sumber Pendapatan Daerah	22
2.1.4.1 Pendapatan Asli Daerah	22
2.1.4.2 Pendapatan Transfer	23
2.1.4.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	28

2.1.5	Hubungan antara PAD dengan Belanja Daerah	29
2.1.6	Hubungan antara DAU dengan Belanja Daerah	30
2.2	Penelitian Terdahulu.....	30
2.3	Kerangka Pemikiran	32
2.4	Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN.....		34
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	34
3.1.1	Variabel Penelitian	34
3.1.2	Definisi Operasional Variabel.....	34
3.2	Populasi	35
3.3	Jenis dan Sumber Data	35
3.4	Metode Pengumpulan Data	36
3.5	Metode Analisis.....	36
3.5.1	Estimasi Model Regresi	37
3.5.2	Deteksi Asumsi Klasik.....	42
3.5.2.1	Deteksi Normalitas	42
3.5.2.2	Deteksi Multikolinearitas	42
3.5.2.3	Deteksi Heteroskedastisitas	43
3.5.2.4	Deteksi Autokorelasi	43
3.5.3	Pengujian Statistik.....	45
3.5.3.1	Koefisien Determinasi (R^2)	45
3.5.3.2	Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji-t)	45
3.5.3.3	Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)	47
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....		48
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian	48
4.1.1	Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah.....	48
4.1.2	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	49
4.1.3	Dana Alokasi Umum Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah ...	49
4.1.4	Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah	50
4.2	Analisis Data (Kabupaten/ Kota).....	51
4.2.1	Pengujian untuk Memilih Pendekatan Terbaik	51

4.2.2	Deteksi Asumsi Klasik.....	53
4.2.2.1	Deteksi Normalitas.....	53
4.2.2.2	Deteksi Multikolinieritas.....	54
4.2.2.3	Deteksi Autokorelasi.....	54
4.2.2.4	Deteksi Heteroskedastisitas.....	55
4.2.3	Pengujian Statistika.....	56
4.2.3.1	Koefisien Determinasi (R^2).....	56
4.2.3.2	Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji-F).....	57
4.2.3.3	Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji-t).....	58
4.3	Analisis Data (Kabupaten).....	59
4.3.1	Pengujian untuk Memilih Pendekatan Terbaik.....	59
4.3.2	Deteksi Asumsi Klasik.....	60
4.3.2.1	Deteksi Normalitas.....	60
4.3.2.2	Deteksi Multikolinieritas.....	61
4.3.2.3	Deteksi Autokorelasi.....	61
4.3.2.4	Deteksi Heteroskedastisitas.....	62
4.3.3	Pengujian Statistik.....	63
4.3.3.1	Koefisien Determinasi (R^2).....	63
4.3.3.2	Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji – F).....	63
4.3.3.3	Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji – t).....	64
4.4	Analisis Data (Kota).....	65
4.4.1	Pengujian untuk Memilih Pendekatan Terbaik.....	65
4.4.2	Deteksi Asumsi Klasik.....	66
4.4.2.1	Deteksi Normalitas.....	66
4.4.2.2	Deteksi Multikolinieritas.....	67
4.4.2.3	Deteksi Autokorelasi.....	68
4.4.2.4	Deteksi Heteroskedastisitas.....	68
4.4.3	Pengujian Statistik.....	69
4.4.3.1	Koefisien Determinasi (R^2).....	69
4.4.3.2	Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji – F).....	69
4.4.3.4	Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji – t).....	70

4.5	Interpretasi Hasil	71
4.5.1	Hasil Regresi Linier Berganda (Kabupaten/ Kota)	71
4.5.2	Hasil Regresi Linier Berganda (Kabupaten)	73
4.5.3	Hasil Regresi Linier Berganda (Kota).....	75
BAB V PENUTUP.....		77
5.1	Simpulan.....	77
5.2	Keterbatasan	77
5.3	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN.....		82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perbandingan Rasio PAD terhadap TPD Kabupaten/ Kota setiap Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2013-2017	7
Tabel 1.2 Perbandingan Proporsi Jumlah PAD dan DAU terhadap Jumlah Realisasi Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2017.....	11
Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson.....	44
Tabel 4.1 Total PAD Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 (dalam rupiah).....	49
Tabel 4.2 Total DAU Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 (dalam rupiah)	50
Tabel 4.3 Total Belanja Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 (dalam rupiah).....	51
Tabel 4.4 Hasil Uji Chow (Kabupaten/ Kota).....	52
Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman (Kabupaten/ Kota)	53
Tabel 4.6 Hasil Deteksi Normalitas (Kabupaten/ Kota)	54
Tabel 4.7 Hasil Deteksi Multikolinieritas (Kabupaten/ Kota)	54
Tabel 4.8 Hasil Deteksi Heteroskedastisitas (Kabupaten/ Kota)	56
Tabel 4.9 Hasil Uji F (Kabupaten/ Kota).....	57
Tabel 4.10 Hasil Uji-t (Kabupaten/ Kota).....	58
Tabel 4.11 Hasil Uji Chow (Kabupaten).....	59
Tabel 4.12 Hasil Uji Hausman (Kabupaten)	60
Tabel 4.13 Hasil Deteksi Normalitas (Kabupaten)	61
Tabel 4.14 Hasil Deteksi Multikolinieritas (Kabupaten)	61
Tabel 4.15 Hasil Deteksi Heteroskedastisitas (Kabupaten)	62

Tabel 4.16 Hasil Uji F (Kabupaten).....	63
Tabel 4.17 Hasil Uji-t (Kabupaten).....	64
Tabel 4.18 Hasil Uji Chow (Kota)	65
Tabel 4.19 Hasil Uji Hausman (Kota).....	66
Tabel 4.20 Hasil Deteksi Normalitas (Kota).....	67
Tabel 4.21 Hasil Deteksi Multikolinieritas (Kota).....	67
Tabel 4.22 Hasil Deteksi Heteroskedastisitas (Kota).....	69
Tabel 4.23 Hasil Uji F (Kota)	70
Tabel 4.24 Hasil Uji-t (Kota)	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Tren Pendapatan Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun 2013-2017	5
Gambar 1.2 Tren Pendapatan Kabupaten secara Agregat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	9
Gambar 1.3 Tren Pendapatan Kota secara Agregat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	10
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	32
Gambar 3.1 Uji Penentuan Model.....	39
Gambar 4.1 Peta Provinsi Jawa Tengah.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Uji Chow (Kabupaten/ kota).....	82
Lampiran B Uji Hausman (Kabupaten/ kota)	82
Lampiran C Uji Normalitas (Kabupaten/ kota).....	82
Lampiran D Uji Heteroskedastisitas (Kabupaten/ kota)	83
Lampiran E Hasil Estimasi FEM (Kabupaten/ kota)	83
Lampiran F Uji Chow (Kabupaten)	84
Lampiran G Uji Hausman (Kabupaten)	84
Lampiran H Uji Normalitas (Kabupaten)	84
Lampiran I Uji Heteroskedastisitas (Kabupaten).....	85
Lampiran J Hasil Estimasi FEM (Kabupaten)	86
Lampiran K Uji Chow (Kota)	86
Lampiran L Uji Hausman (Kota)	87
Lampiran M Uji Normalitas (Kota)	87
Lampiran N Uji Heteroskedastisitas (Kota).....	88
Lampiran O Hasil Estimasi FEM (Kota)	88
Lampiran P Tren Pendapatan Kabupaten/ kota se-Indonesia	89
Lampiran Q Data Mentah.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam praktek ketatanegaraan sejak awal kemerdekaan Indonesia, telah dirumuskan bahwa terdapat pembagian kekuasaan pemerintahan agar negara dapat dikelola dengan baik serta tujuan dari negara dapat tercapai. Menurut Asshiddiqie (2006), pembagian kekuasaan terbagi dalam dua cara yaitu: pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan negara berdasarkan fungsinya yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pembagian kekuasaan pemerintahan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang ada di bawahnya dalam negara kesatuan, atau pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian dalam suatu negara federal.

Pembagian kekuasaan secara vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen) yang tercantum pada pasal 18 yang menyebutkan bahwa daerah Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dalam Undang-Undang No.1/1957 tentang “Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah” juga

disebutkan bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan secara merata hingga keseluruhan pelosok negeri serta terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka dikeluarkan Undang-Undang No. 5/1974 sebagai revisi undang-undang yang sudah ada sebelumnya tentang “Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah” dimana diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah. Dalam undang-undang tersebut pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan perkembangan dan pembangunan daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi serta tugas pembantuan. Undang-Undang No.5/1974 yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 22/1999 tentang “Pemerintahan Daerah”. Pada hakikatnya otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan yang berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 22/1999 mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah serta otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi dengan menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi, aspirasi masyarakat, potensi dan kemampuan daerah, serta berlandaskan pemerataan dan keadilan. Dalam melaksanakan otonomi daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta tercapainya pembangunan, diperlukan prinsip-prinsip otonomi

daerah yang nyata, luas, serta pertanggung jawaban pemerintah daerah. Oleh karena itu, harus disertai dengan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai sumber-sumber pembiayaan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sesuai pembagian kewenangan maupun tanggung jawab disetiap tingkat pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 25/1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”.

Dalam perkembangannya Undang-Undang No. 22/1999 tentang “Pemerintahan Daerah” dan Undang-Undang No. 25/1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” direvisi dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 32/2004 tentang “Pemerintahan Daerah” dan Undang-Undang No. 33/2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”. Undang-undang mengenai pemerintahan daerah kembali direvisi dengan diterbitkannya Undang-Undang No.23/2014 tentang “Pemerintahan Daerah” agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Agustina (2013), dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan sebagai reformasi pembiayaan atau *financing reform* yang diharapkan dapat lebih baik dibandingkan sebelum adanya otonomi daerah. Aspek pertama adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengurus pembiayaan daerah dengan mengandalkan pendapatan asli daerah. Aspek kedua yaitu dari sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan

daerah harus lebih akuntabel dan transparan serta menuntut daerah agar lebih efektif dan efisien dalam pengeluaran daerah.

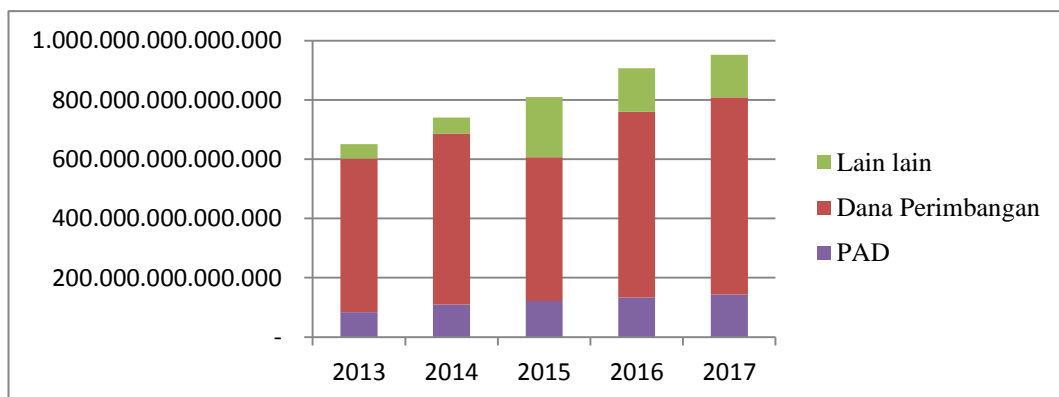
Sesuai dengan pendapat Agustina, menurut Rahman, dkk (2014), salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintahan pusat dengan proporsi yang semakin mengecil dimana pendapatan asli daerah memiliki peran yang cukup besar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal itu didukung dengan adanya kebijakan alokasi antara pemerintah pusat dan daerah yang tercermin dalam bentuk semakin besarnya anggaran yang didaerahkan dan keleluasaan penggunaannya.

Menurut Halim (2004), kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan merupakan ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah. Akan tetapi setiap daerah di Indonesia memiliki potensi wilayah yang berbeda, sehingga akan menghasilkan ketimpangan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berbeda antar daerah. Oleh karena itu dalam pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah maka terdapat transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN berupa Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengalokasian DAU ditentukan berdasarkan besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) di suatu daerah. Apabila suatu daerah memiliki kebutuhan fiskal yang besar

sedangkan potensi fiskal yang kecil maka akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar, begitu juga sebaliknya (Ndadari, 2008).

Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2011) menunjukkan bahwa secara nasional dana perimbangan merupakan pos yang paling mendominasi yaitu sebesar 68,0 persen dalam komposisi pendapatan daerah, sedangkan PAD sebesar 19,0 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 13 persen. Dominasi dana perimbangan dalam tren pendapatan kabupaten/ kota se-Indonesia juga masih terjadi pada tahun 2013 hingga 2017.

Gambar 1.1
Tren Pendapatan Kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun 2013-2017



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2013-2017, diolah.

Berdasarkan Gambar 1.1 dari tahun anggaran 2013 sampai 2017, dana perimbangan cenderung mengalami kenaikan meskipun menurun pada tahun anggaran 2015. Pada tahun anggaran 2015 dana perimbangan kabupaten/ kota sebesar Rp 429,7 triliun atau 60,97 persen dari komposisi pendapatan. Besaran lain-lain pendapatan yang sah kabupaten/ kota pada tahun 2013 hanya sebesar Rp 41,9 triliun jumlah tersebut naik menjadi Rp 121,4 triliun pada tahun 2017,

bahkan pada tahun 2015 mencapai Rp 153,5 triliun atau berkontribusi sebesar 21,79 persen dari total pendapatan. Meskipun selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, pendapatan asli daerah hanya memiliki porsi yang kecil yaitu sebesar 14,93 persen atau sebesar Rp 83,3 triliun pada tahun 2013 dan naik menjadi 18,04 persen atau sebesar Rp 143,4 triliun pada tahun 2017.

Salah satu gagasan yang melandasi otonomi daerah dan perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah terjadinya ketimpangan serta perbedaan kemampuan keuangan antar daerah dimana terjadi perbedaan kemampuan antara daerah yang berada di Pulau Jawa dan daerah yang berada di luar Pulau Jawa pada umumnya. Pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi di Jawa-Bali dalam laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2011) secara agregat mampu mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri dengan rata-rata PAD sebesar 32,94 persen dimana angka tersebut lebih baik dari pada kelompok Provinsi Nusa Tenggara-Maluku-Papua, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah kabupaten/ kota di Pulau Jawa diharapkan dapat menjadi *role model* dalam mencapai pemerintahan yang baik khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Hakim (2005), dalam mengevaluasi kemampuan keuangan suatu daerah secara umum alat analisis yang digunakan adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD). Berikut adalah data perbandingan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah kabupaten/ kota secara agregat setiap provinsi di Pulau Jawa.

Tabel 1.1
Perbandingan Rasio PAD terhadap TPD Kabupaten/ Kota setiap Provinsi di
Pulau Jawa Tahun 2013-2017

Tahun						
Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
Banten	0,2539	0,2497	0,3254	0,3263	0,3107	0,2932
DKI Jakarta	0,6795	0,7136	0,7620	0,6858	0,6642	0,7010
Jawa Barat	0,1827	0,2146	0,2221	0,2289	0,2505	0,2197
Jawa Tengah	0,1251	0,1596	0,1547	0,1634	0,1506	0,1506
Jawa Timur	0,1565	0,1823	0,1899	0,1919	0,1854	0,1812
DI Yogyakarta	0,1772	0,2192	0,2247	0,2297	0,2147	0,2131

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2013-2017, diolah

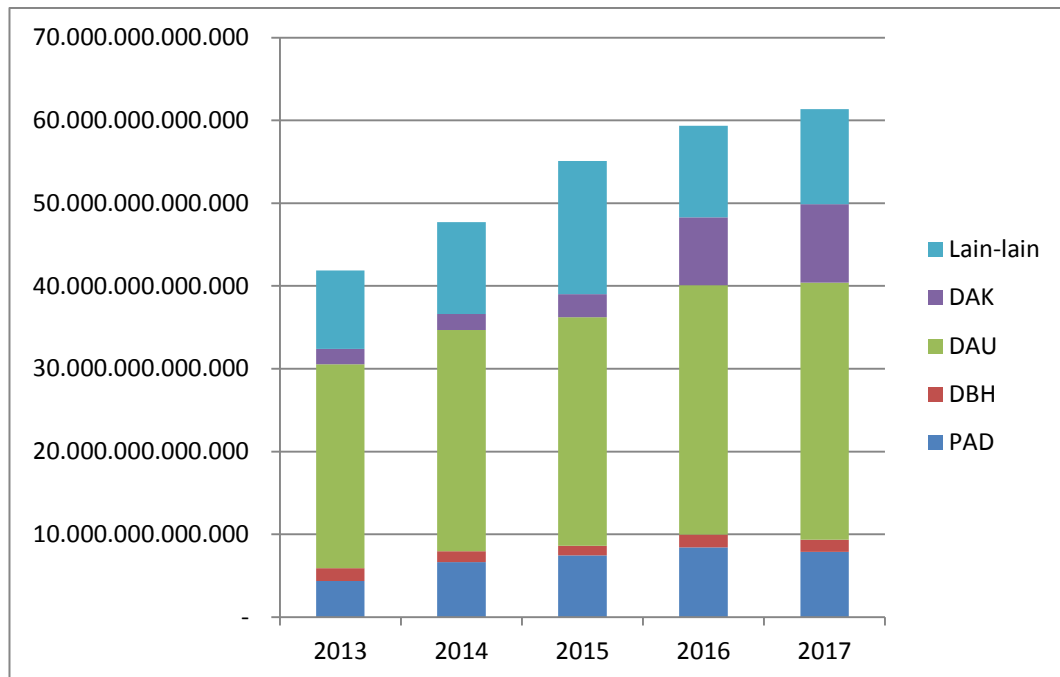
Berdasar Tabel 1.1 selama kurun waktu tahun 2013 hingga 2017 kabupaten/ kota di Jawa Tengah memiliki rasio antara pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah paling rendah disetiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kemampuan keuangan daerah kabupaten/ kota di Jawa Tengah masih sangat rendah dimana pendapatan asli daerah selama kurun waktu tersebut rata-rata hanya memiliki kontribusi 0,1506 atau 15,06 persen dalam total pendapatan daerah. Rata-rata tersebut terendah jika dibandingkan dengan kabupaten/ kota di provinsi lain, dimana kabupaten/ kota di Provinsi Banten memiliki rata-rata 29,32 persen, kabupaten/ kota di DKI Jakarta dengan rata-rata 70,1 persen, kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat memiliki rata-rata 21,97 persen, kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur sebesar 18,12 persen dan kabupaten/ kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rata-rata 21,3 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam membiayai kegiatan pemerintahan kabupaten/ kota di Jawa Tengah dalam periode tersebut paling banyak mengalami ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan kabupaten/ kota di provinsi lainnya di Pulau Jawa.

Dalam penerapan otonomi daerah, pajak daerah dan retribusi daerah dalam pos pendapatan asli daerah diharapkan menjadi sumber utama penerimaan daerah otonom. Menurut Kuncoro (2007), dominasinya transfer atau dana perimbangan daripada PAD dalam membiayai belanja pemerintah daerah sebenarnya tidak memberikan panduan yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya bukti-bukti empiris secara internasional yang menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer berhubungan negatif dengan governansinya.

Pemberian dana alokasi umum yang bertujuan meratakan kemampuan keuangan antar daerah guna mendanai segala kebutuhan dalam pelaksanaan desentralisasi ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah satu dengan daerah lain sehingga diharapkan memiliki kesiapan yang sama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pada dasarnya daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah akan mendapatkan dana alokasi umum dalam jumlah yang relatif besar, sebaliknya daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang lebih baik cenderung mendapatkan dana alokasi umum yang jumlahnya lebih kecil.

Menurut Kuncoro (2007), perbedaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah akan menghasilkan perbedaan sumber-sumber penerimaan yang selanjutnya akan berdampak pada perbedaan belanja di masing-masing daerah. Potensi pajak dan retribusi daerah yang ada di kabupaten tentu saja berbeda dengan potensi pajak dan retribusi daerah di kota sehingga berdampak pada perbedaan dana alokasi umum yang diberikan, hal ini juga terjadi di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

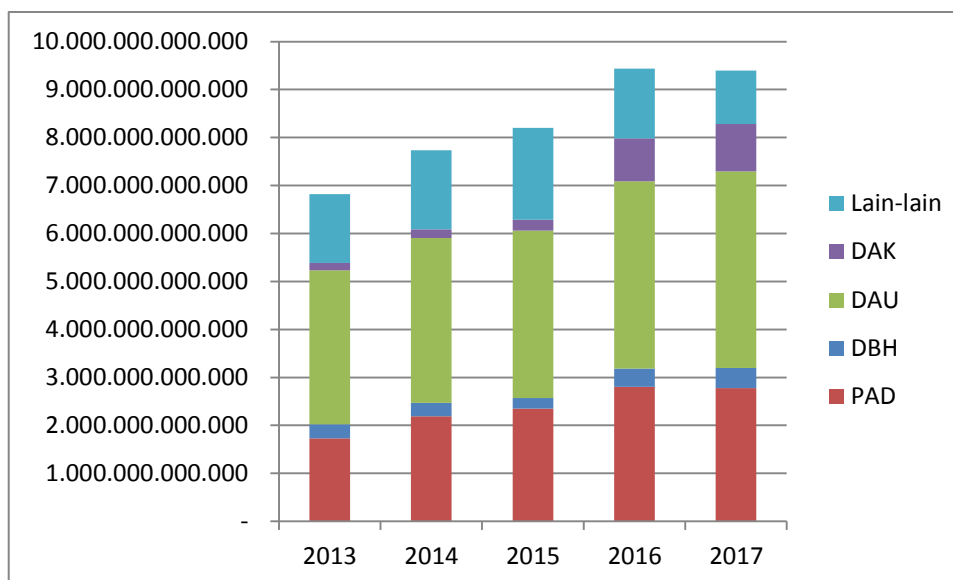
Gambar 1.2
Tren Pendapatan Kabupaten secara Agregat Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2017



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2013-2017, diolah

Pendapatan kabupaten berdasarkan Gambar 1.2 diatas memiliki kemiripan dengan tren pendapatan kota pada Gambar 1.3, dimana dana alokasi umum memiliki komposisi yang besar dibandingkan sumber pendapatan lainnya. Nilai DAU baik kabupaten ataupun kota terus mengalami kenaikan dari tahun anggaran 2013 sampai tahun anggaran 2017. Nilai PAD kabupaten juga mengalami kenaikan disetiap tahunnya, pada tahun anggaran 2013 PAD kabupaten sebesar Rp 4,36 triliun dan pada tahun anggaran 2017 menjadi Rp 7,87 triliun atau 12,84 persen dari total pendapatan. Pada tahun anggaran 2013 nilai PAD kota sebesar Rp 1,72 triliun atau berkontribusi sebesar 25,35 persen dari total pendapatan. Nilai tersebut naik menjadi Rp 2,77 triliun atau 29,53 persen dari total pendapatan pada tahun 2017.

Gambar 1.3
Tren Pendapatan Kota secara Agregat Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2017



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2013-2017, diolah

Besaran transfer pemerintah pusat masih sangat mendominasi sumber pendapatan daerah baik kabupaten maupun kota, sedangkan porsi PAD masih relatif rendah. Dari fenomena tersebut dapat diindikasikan bahwa daerah belum mampu menggali potensi sumber penerimaan sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri.

Menurut Maemunah (dalam Ndadari, 2008) transfer DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Kuncoro (2007) yang menyebutkan bahwa transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan meningkatkan pengeluaran konsumsi barang publik, tetapi tidak menjadi substitusi bagi pajak daerah. Dominannya peran transfer relatif terhadap PAD dalam membiayai belanja pemerintah daerah sebenarnya

juga tidak memberikan panduan yang baik bagi pemerintah (*governance*) terhadap aliran transfer itu sendiri.

Tabel 1.2
Perbandingan Proporsi Jumlah PAD dan DAU terhadap Jumlah Realisasi Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Tahun	Proporsi Kabupaten		Proporsi Kota	
	PAD	DAU	PAD	DAU
2013	10,82%	61,11%	27,24%	50,63%
2014	14,55%	58,37%	30,07%	47,16%
2015	13,97%	51,81%	29,79%	44,15%
2016	13,60%	48,57%	30,03%	41,78%
2017	12,18%	48,02%	27,00%	39,85%
Rata-rata	13,02%	53,58%	28,83%	44,71%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2013-2017, diolah.

Berdasarkan Tabel 1.2 pada tahun 2013 jumlah PAD kabupaten berkontribusi sebesar 10,82 persen atau sebesar Rp 4,36 triliun terhadap jumlah belanja daerah seluruh kabupaten. Nilai kontribusi terhadap jumlah belanja daerah tersebut meningkat menjadi 12,18 persen atau Rp 7,87 triliun. Rata-rata jumlah PAD kabupaten berkontribusi sebesar 13,02 persen dalam jumlah belanja daerah kabupaten, rata-rata tersebut lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata kontribusi jumlah PAD kota terhadap jumlah belanja kota yaitu sebesar 28,83 persen. Nilai DAU meningkat disetiap tahunnya baik di kabupaten dan kota. Rata-rata DAU kota berkontribusi 44,71 persen dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah, sedangkan DAU kabupaten berkontribusi lebih besar yaitu sebesar 53,58 persen. Semakin besar DAU yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah juga akan semakin tinggi (Budiarti, 2013).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakoso pada tahun 2004 mengenai analisis pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta membuktikan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Penelitian Priambudi (2015) mendapatkan hasil serupa bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja kabupaten/ kota di Pulau Jawa tahun 2013.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk mengurus sendiri rumah tangganya serta memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan daerahnya. Perbedaan potensi antar daerah menghasilkan ketimpangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbeda-beda. Oleh karena itu terdapat dana transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pemerataan kemampuan keuangan atau menutup celah fiskal daerah.

DAU yang berfungsi menutup celah fiskal dimana kebutuhan fiskal tidak sebanding dengan potensi fiskal daerah ternyata lebih besar dari pada PAD dalam membiayai belanja daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Dengan kata lain besaran belanja daerah bergantung pada besaran dana transfer dari pemerintah pusat.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dilakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah dengan studi kasus kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah kota-kota di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
3. Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah kota-kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, untuk memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu ekonomi pembangunan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah.
2. Kegunaan praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan kebijakan

pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota Provinsi Jawa Tengah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dan struktur penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I pendahuluan, bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian ini yang mencakup latar belakang yang mendasari munculnya masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II telaah pustaka, pada bab kedua akan diuraikan mengenai landasan teori yang menjelaskan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis, penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran. Bagian kerangka pemikiran menjelaskan permasalahan yang akan diteliti secara singkat kemudian dapat ditarik hipotesis.

Bab III metode penelitian, pada bab ketiga ini menguraikan tentang variabel penelitian, populasi, jenis dan sumber data. Metode pengumpulan data serta metode analisis dalam penelitian ini akan dijelaskan dengan rinci.

Bab IV hasil dan analisis, pada bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi obyek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil. Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan, keterbatasan penelitian, dan saran.